

Penyusunan RKP 2020 Bidang Komunikasi

Direktorat Politik dan Komunikasi
Jakarta, 6 Februari 2019

Outline

- 1 Arahan RPJPN 2005-2025
- 2 DRAFT – RPJMN 2020-2024 bidang Politik dan Komunikasi
- 3 DRAFT – Penyusunan RKP 2020

1

ARAHAN RPJPN 2005-2025



ARAHAN RPJP NASIONAL 2005 – 2025

- **Rencana pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025** merupakan acuan, arah dan **prioritas pembangunan** secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya.
- **Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025** terbagi dalam 4 (empat) tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dimana **saat ini akan memasuki periode terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke IV tahun 2020-2025.**
- Visi dan misi pembangunan dalam RPJP Nasional menjadi landasan untuk mencapai **tujuan dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang fokus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.**
- Selain itu, **tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)** yang dimana sebagian besar dari tujuan global telah tercermin dalam agenda nasional.



KERANGKA PEMBANGUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIS RPJMN 2020-2024

Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum:

memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat

UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025



I RPJMN 2005 - 2009



II RPJMN 2010 - 2014

III RPJMN 2015 - 2019

IV RPJMN 2020 - 2024

Penguatan struktur politik dan pengokohan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila

perbaiki peran negara dan masyarakat melalui penguatan kapasitas OMS dan Parpol

Pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan titik berat pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan

Perwujudan konsolidasi demokrasi pada semua bidang kehidupan sosial politik, berupa tegaknya supremasi hukum dan HAM

ARAH KEBIJAKAN RPJPN 2005 – 2025

BIDANG KOMUNIKASI

- Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga dan menjamin hak masyarakat untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis
- Menciptakan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas
- Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen
- Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosok nusantara sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa
- Meningkatkan peran lembaga independen di bidang kominfo untuk lebih mendukung proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dan perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan
- Mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi secara nasional dan mencegah monopoli informasi
- Memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat internasional supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan Indonesia pada posisi politik yang menyulitkan

2

DRAFT RPJMN 2020-2024 BIDANG POLITIK DAN KOMUNIKASI



EMPAT PILAR RPJMN IV TAHUN 2020 - 2024

DRAF



Kelembagaan
Politik dan Hukum



Kesejahteraan
masyarakat yang
terus meningkat



Struktur Perekonomian
makin maju dan kokoh
ditandai dengan daya
saing perekonomian
yang kompetitif



Terwujudnya
keanekaragaman
hayati



KERANGKA PEMBANGUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIS RPJMN 2020-2024

DRAF



VISI 2045



Berdaulat, Maju, Adil Dan
Makmur

2020-2024



Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

TEMA



Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan

PEMBANGUNAN MANUSIA

- 1 Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
- 2 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

PEMBANGUNAN EKONOMI

- 1 Pangan
- 2 Energi
- 3 Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital
- 4 Industri Manufaktur
- 5 Kelautan dan Kemaritiman

PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

- 1 Sentra-Sentra Pertumbuhan
- 2 Komoditas Unggulan Daerah
- 3 Pertumbuhan Perkotaan

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

- 1 Transportasi
- 2 Telekomunikasi
- 3 Sumber Daya Air
- 4 Perumahan dan Pemukiman

PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

- 1 Hukum dan Regulasi
- 2 Pertahanan dan Keamanan
- 3 Politik

Development Constraints :

Kondisi Investasi

Kondisi SDA

PENGARUSUTAMAAN

Kesetaraan Gender

Tata Kelola (Governance)

Kerentanan Bencana

Perubahan Iklim

Modal Sosial dan Budaya

Kaidah Pembangunan :

Membangun Kemandirian

Menjamin Keadilan

Menjaga Keberlanjutan



ISU STRATEGIS : POLITIK DALAM NEGERI

DRAF

Lembaga Demokrasi



Biaya politik tinggi dan lemahnya transparansi serta akuntabilitas partai politik

Penyelenggara Pemilu yang rawan intervensi politik

Lemahnya peraturan perundangan bidang politik

Hak-Hak Politik dan Kebebasan Sipil



Rendahnya kualitas implementasi dari hak-hak politik

Tingginya potensi ancaman pada kebebasan sipil

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih

Aktualisasi Ideologi Negara



Belum dijadikannya Pancasila sebagai acuan utama penetapan kebijakan

Menguatnya ideologi transnasional

Belum terintegrasinya Program Wawasan Kebangsaan

Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara

Komunikasi Publik



Perubahan paradigma komunikasi publik pemerintah

Ketergantungan media penyiaran pada rating tunggal yang berbasis kuantitas

Maraknya konten digital yang disinformasi dan misinformasi

Kegagalan masyarakat dalam memanfaatkan dan memahami konten informasi di media baru



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLITIK DALAM NEGERI

DRAF



Penataan Lembaga Demokrasi

Menyusun skema bantuan keuangan parpol

Mendorong demokrasi internal parpol

Memperkuat transparansi dan akuntabilitas parpol

Memperkuat penyelenggara Pemilu

Menyempurnakan UU Bidang Politik

Penguatan Hak-Hak Politik dan Kebebasan Sipil

Melakukan pendidikan politik dan pemilih secara konsisten

Meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil

Mendorong tatakelola ke pemilu yang baik

Penguatan Wawasan Kebangsaan

Mengarustamakan Pancasila dalam kebijakan program pembangunan

Merevitalisasi pusat pendidikan kebangsaan dan bela negara

Meningkatkan kapasitas ASN berbasis Pancasila

Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tim Terpadu tingkat Nasional dan Daerah

Memantapkan dan mengembangkan sistem deteksi dini

Memantapkan program Revolusi Mental (Gerakan Indonesia Bersatu)

Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik

Memperkuat Integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D

Meningkatkan akses partisipasi masyarakat

Menyusun standarisasi lembaga pers dan jurnalis

Meningkatkan literasi media kepada masyarakat



TARGET DAN INDIKATOR POLITIK DALAM NEGERI

DRAF

Meningkatkan efektivitas lembaga demokrasi

- Skor IDI Aspek Kelembagaan Demokrasi

Memenuhi hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil

- Skor IDI Aspek Hak Hak Politik
- Skor IDI Aspek Kebebasan Sipil
- Tingkat partisipasi pemilih
- Indeks Kerawan Pemilu

1. Menjadikan Pancasila sebagai acuan utama kebijakan program pembangunan
 - Indeks Aktualisasi Pancasila
2. Memantapkan kurikulum pendidikan berbasis Pancasila
3. Meningkatkan diskursus Pancasila yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kapasitas ASN berbasis Pancasila
5. Mengintegrasikan Program/Kegiatan Wawasan Kebangsaan

1. Menguatkan tata kelola informasi dan komunikasi publik
 - Tingkat Efektivitas pengelolaan komunikasi publik
2. Meningkatkan kualitas konten informasi di dunia penyiaran dan pers
 - Rating nasional bidang penyiaran
 - Standarisasi dan sertifikasi untuk seluruh lembaga pers dan jurnalis, khususnya yang berbasis digital

Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif

Terpenuhinya hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil

Menguatnya Wawasan Kebangsaan

Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS POLITIK DALAM NEGERI

DRAF





Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui strategi:

- Penguatan integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D sesuai dengan asas-asas keterbukaan informasi publik
- Penguatan media-media lokal dan alternatif sebagai sumber informasi utama masyarakat
- Penyediaan konten informasi publik yang berkualitas dan merata, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T
- Peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi
- Peningkatan akses partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik secara langsung dan digital
- Peningkatan literasi media masyarakat melalui pendidikan dan pendekatan sosial budaya;
- Penyusunan standardisasi lembaga pers dan jurnalis
- Peningkatan kualitas isi siaran TV melalui pembentukan rating nasional serta penguatan peran KPI

3

PENYUSUNAN RKP 2020



TEMA DAN PN RKP 2020

Kesepakatan Tema RKP 2020

“Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas”

PN

- Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
- Penguatan Konektivitas dan Pemerataan
- Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja
- Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

DRAF

PN 2: Penguatan Konektivitas dan Pemerataan

PP 1 – Pemerataan Pelayanan Dasar



PP 2 – Infrastruktur Ekonomi



Penguatan Konektivitas dan Pemerataan



PP 3 – Infrastruktur Perkotaan



PP 4 – Teknologi Informasi Komunikasi

DRAF

PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja

PP-2 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil



PP-4 Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)



Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja



PP-1 Penguatan Kewirausahaan dan UMKM



PP-3 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja



PP-5 Perkuatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

DRAF

PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

PP 1 – Penguatan
Kapabilitas Pertahanan



PP 2 – Peningkatan Diplomasi
Politik dan Ekonomi



PP 3 – Penguatan Sistem
Hukum dan Upaya Anti Korupsi



Stabilitas Pertahanan dan Keamanan



PP 4 – Pencegahan dan
Pemberantasan Narkoba



PP 5 – Penanggulangan Terorisme
dan Peningkatan Kamtibmas



PP 3 – Penguatan Sistem Hukum dan Upaya Anti Korupsi

DRAF

- **Penguatan Kualitas Tata Kelola Komunikasi Publik**
- ** Penataan Standardisasi Pers dan Jurnalis**
- ** Peningkatan Keragaman dan Kualitas Konten Penyiaran**
- ** Pendidikan Pemilih**
- ** Pengawasan Pemilu Partisipatif**

Keterangan :
* : KP (Kegiatan Prioritas)
** : ProP (Proyek Prioritas)





TAHAPAN RENCANA PENYUSUNAN PAGU K/L





ARAHAN PROYEK PRIORITAS RKP 2020



Perencanaan Proyek Prioritas Tahun 2020



1 Penyusunan Proyek Prioritas

1. Berpedoman pada RPJMN, Renstra K/L, Rancangan Tema, Sasaran dan Arah Kebijakan RKP, Kebijakan Presiden, dsb.
2. Mempertimbangkan hasil evaluasi dan usulan dari pemerintah daerah dan/atau kelompok masyarakat.

2 Pengusulan Proyek Prioritas

1. Usulan dilengkapi dengan persyaratan umum dan khusus
2. Pembahasan dua pihak antara Kementerian Perencanaan dan K/L

3 Penilaian, Penetapan, Pemantauan dan Pengendalian Proyek Prioritas

1. Menteri Perencanaan melakukan penilaian kelayakan usulan Proyek Prioritas
2. Proyek Prioritas yang layak selanjutnya ditetapkan dalam Daftar Proyek Prioritas
3. Menteri Perencanaan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Proyek Prioritas melalui rapat, kunjungan lapangan dan/atau mekanisme lainnya

KATEGORI PROYEK PRIORITAS

- Proyek Fisik
- Proyek Non Fisik
- Gabungan Proyek Fisik dan Non Fisik

KRITERIA PROYEK PRIORITAS

- memiliki relevansi dengan Prioritas RT RPJMN 2020-2024;
- memenuhi pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial;
- memiliki sasaran dan dampak yang signifikan;
- bukan kegiatan rutin atau berulang pada setiap tahun;
- memenuhi tahapan proyek; dan
- dilaksanakan pada satu periode waktu tertentu
- Penyelesaian target prioritas RPJMN 2015-2019 yang belum terselesaikan



IDENTIFIKASI AWAL KEGIATAN/PROYEK UNTUK RKP 2020

- a. **Identifikasi output/proyek prioritas yang akan berhenti/berakhir di tahun 2019**
- b. **Identifikasi output/proyek prioritas yang dapat diefisiensikan**
- c. **Identifikasi output/proyek yang berlanjut dan perlu dilakukan penajaman**
- d. **Identifikasi output/proyek yang bersifat multiyears**
- e. **Identifikasi inisiasi output/proyek baru**

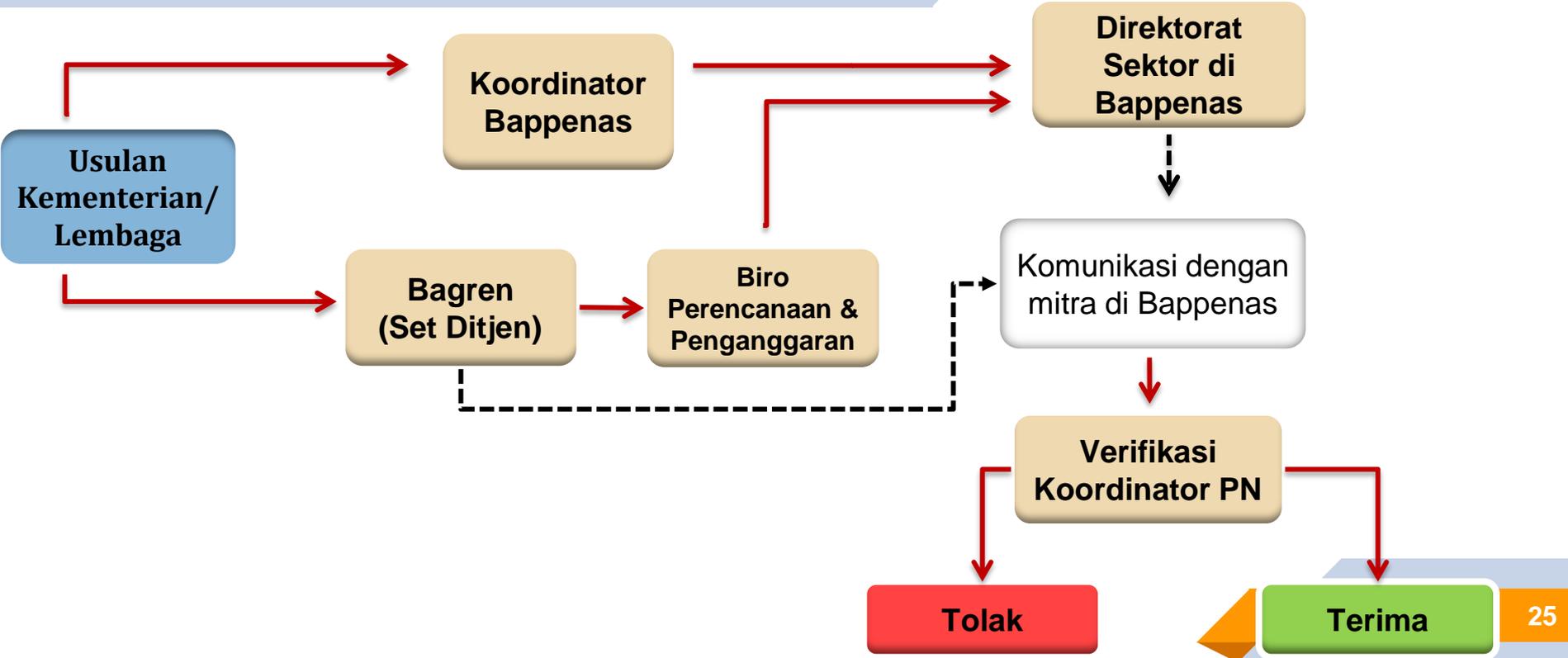


HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGUSULAN INISIASI BARU

- a. **Terkait dengan arah kebijakan RT RPJMN 2020-2024;**
- b. **Strategis, berdampak luas, dan langsung terkait dengan masyarakat;**
- c. **Target belum tercapai pada periode sebelumnya;**
- d. **Harus dapat diterjemahkan dengan baik dan jelas sasaran lokasi pelaksanaannya**



ALUR PENGAJUAN USULAN PROYEK PRIORITY (K/L)



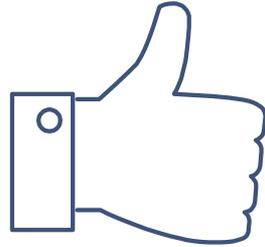


TINDAK LANJUT

- a. Identifikasi proyek prioritas (PN/PB) dalam format form B dan C.
- b. Input rancangan Renja K/L 2020 dalam aplikasi KRISNA.
- c. Identifikasi dan klarifikasi matriks RPJMN 2020-2024 hasil analisis Direktorat Otonomi Daerah (sebagaimana tabel terlampir)

HAL-HAL UNTUK MENJADI PERHATIAN:

- a. Identifikasi dapat dilakukan berdasarkan data dalam sistem KRISNA atau RKA KL, untuk nantinya dituangkan ke dalam aplikasi KRISNA dan usulan Form B dan C
- b. Fokus alokasi pada prioritas/proyek yang berlanjut (untuk mencegah mangkrak)
- c. Sesuai dengan arah kebutuhan prioritas yang ada dalam rancangan RPJMN 2020-2024
- d. Prioritas/proyek baru tergantung dari ketersediaan anggaran



TERIMA KASIH